

EVALUASI TATA KELOLA TERMINAL TIPE C TUAH TUALANG DI KABUPATEN SIAK

Oleh: Ike Puspita

Pembimbing: Adianto

Program Studi Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl.H.R Soebrantas Km 12,5 Simp, Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Siak Regency is one of the Districts that has excellent tourist destinations, which in the presence of superior tourist destinations, transportations facilities and infrastructure are needed as tourism support in Siak Regency. One of the problems of transportation facilities and infrastructure is the management of Tuah Tualang Type C Terminals in Siak Regency, this is because there are still many shadow terminals and ticket agents around the Tualang Sub-District road and the public transport route network has not been arranged. The purpose of this study was to evaluate terminal management and look at the evaluation factors for the management of Tuah Tualang Type C Terminal in Regency. The theoretical concept used is the theory of evaluation by Dunn in (Nugroho, 2017), namely : effectiveness, efficiency, sufficiency, equity, responsiveness, and determination. This study uses qualitative methods with a case study approach, and uses purposive sampling technique, with data collection techniques including : observation, interviews, and documentation. The results of the evaluation of the management of the type C terminal of Tuah Tualang in Siak Regency have not run optimally and have not been realized properly. it is better to improve the status of the terminal to type A and to arrange a system for the public transport route network at the Tuah Tualang terminal in Siak Regency.

Keywords : Evaluation, Governance, Terminal

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten dengan ibu kotanya “Siak Sri Indrapura” yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Siak memiliki destinasi wisata unggulan, yang dapat dijadikan sebagai salah satu penghasil devisa bagi pemerintah maupun masyarakat. Pengunjung destinasi tersebut berasal dari wisatawan domestik maupun luar negeri. Disamping destinasi wisata tentu dibutuhkan infrastruktur sebagai penunjang wisata di Kabupaten Siak.

Kabupaten Siak saat ini telah memasuki usianya yang ke 19 tahun, di usianya yang masih tergolong belia, namun pembangunan di berbagai bidang telah di laksanakan, mulai dari pembangunan fisik maupun sumber daya manusia. Pembangunan tersebut terus mengalami kemajuan dan peningkatan melalui program-program pemerintah Siak. Salah satu hasil pembangunan dari sektor infrastruktur adalah pada sektor perhubungan, telah di bangun tiga unit terminal angkutan darat.

Terminal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan umum maupun distribusi barang. Terminal merupakan pangkalan kendaraan bermotor umum digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan) harus dapat bekerja secara optimal dan efisien sehingga dapat mendukung mobilitas penduduk, ketertiban lalu lintas, disamping itu Terminal juga berfungsi sebagai sarana penunjang bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi.

Kabupaten Siak, kecamatan Tualang dengan Ibu Kota Perawang, terminal Buah Tualang tergolong terminal Tipe C yang berfungsi melayani kendaraan angkutan umum untuk angkutan pedesaan. Namun dikarenakan tata guna lahan di perawang di domisili oleh sektor industri dengan luas wilayah kecamatan tualang 373,75 km. Jumlah penduduk di perawang juga merupakan jumlah penduduk sebaran terbesar di Kabupaten Siak, menyebabkan meningkatnya kegiatan transportasi, maka terminal Buah Tualang juga harus melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan atau Antar Lintas Batas Negara Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota, dan angkutan pedesaan. Jika dilihat dari

pereencanaan awal terminal Buah Tualang yaitu terminal tipe A. Namun dalam realisasinya terminal Buah Tualang dibangun menjadi terminal tipe C

Dinas Perhubungan merupakan pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan pelayanan dibidang perhubungan yang mana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembuatan di bidang perhubungan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan pemerintah daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Siak memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dibidang perhubungan.

Fenomena-fenomena yang terjadi di Terminal Tipe C Buah Tualang di Kabupaten Siak yaitu:

Pertama, Terminal bayangan, permasalahan terminal bayangan menjadi masalah serius bagi pihak Dinas Perhubungan karena terminal bayanganlah yang membuat arus perpindahan penumpang di terminal Buah Tualang tidak berjalan optimal. Para sopir angkutan berdalih enggan nya memasuki terminal Buah Tualang karena akses menuju terminal belum ada kendaraan umum sehingga terminal sulit dijangkau dan terasa jauh bagi penumpang, yang menyebabkan minimnya penumpang yang berada di lokasi tersebut. Masih kurangnya kesadaran para sopir angkutan kota untuk pindah kedalam terminal Buah Tualang yang telah disediakan. Kurangnya komunikasi yang diciptakan antara Dinas Perhubungan dengan sopir-sopir sangat merugikan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Siak. Kecenderungan masyarakat (penumpang) untuk memanfaatkan terminal bayangan juga semakin memperburuk keadaan. Penumpang lebih sering menunggu bus di pinggir jalan tanpa harus menempuh

jarak yang jauh ke terminal Buah Tualang.

Kedua, Kurangnya sumber daya manusia, kelemahan yang muncul juga terjadi pada sumber daya manusia yang kurang, karena di terminal Buah Tualang hanya terdapat satu orang pegawai koordinator, empat orang operator, tiga orang keamanan dan lima orang kebersihan. Dengan sumber daya manusia yang berjumlah satu pegawai dan dua belas honorer tersebut, kurang mampu mengelola organisasi dan manajerial para pengurus terminal yang telah dibentuk oleh Dinas Perhubungan.

Ketiga, Tidak optimalnya fungsi terminal, karena kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah dan kurang tegas melaksanakan kebijakan untuk menjaga ketertiban operasional terminal dan kurangnya pengawasan dari Dinas Perhubungan terhadap kios-kios agen tiket. Kios-kios tersebut juga digunakan sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang tanpa harus melalui terminal Buah Tualang.

Ke empat, Jaringan trayek yang belum tertata, permintaan terhadap angkutan umum menurun akibat meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi, investasi dibidang kepengusahaan angkutan umum tidak diminati pengusaha karena belum menjanjikan secara ekonomi dan finansial, dan bahwasannya sepi penumpang, sehingga orang tidak minat jadi pengusaha angkot. Hal tersebut menjadi alasan belum tertatanya jaringan trayek di terminal Tipe C Buah Tualang di Kabupaten Siak.

Maka dari itu perlu dilakukan evaluasi agar dapat meningkatkan tata kelola Terminal Buah Tualang yang baik. Berdasarkan fenomena yang peneliti paparkan di latar belakang, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang **“EVALUASI TATA KELOLA TERMINAL TIPE C**

TUAH TUALANG DI KABUPATEN SIAK”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan serta fenomena-fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana evaluasi tata kelola terminal Tipe C Buah Tualang di Kabupaten Siak?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat evaluasi tata kelola terminal Tipe C Buah Tualang di Kabupaten Siak?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui evaluasi tata kelola terminal Tipe C Buah Tualang di Kabupaten Siak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat evaluasi tata kelola terminal Tipe C Buah Tualang di Kabupaten Siak.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memacu perkembangan penelitian khususnya di bidang Administrasi Publik, terutama untuk pengembangan teori-teori implementasi, evaluasi dan manajemen.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan dan koreksi bagi pihak instansi terkait, khususnya dinas perhubungan Kabupaten Siak dalam pengembangan dan pengambilan keputusan, khususnya mengenai tata kelola terminal, sehingga dapat mengoptimalkan tata kelola terminal Buah Tualang di Kabupaten Siak.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai wahana untuk menambah dan menerapkan ilmu pengetahuan yang di

dapat selama menuntut ilmu di masa perkuliahan sebagai referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Sebagai rujukan bagi kalangan peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.

2.KONSEP TEORI

2.1 Konsep Implementasi

Purwanto dan Sulistyastuti (2015:21) memberikan definisi bahwa implementasi dapat dimaknai dengan beberapa kata kunci berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to complete*). Dari sebagai kata kunci yang mulai digunakan untuk mendefinisikan implementasi tersebut .Agustino (2016:126) mendefinisikan Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan kedalam bentuk tindakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2014:146). Menurut Lester dan Stewart dalam (Winarno, 2014:147) menjelaskan implemtasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-

program. Menurut Replay dan Franklin dalam (Winarno, 2014:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang atau kebijakan ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijkana, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Pandangan Grindle dalam (Winarno, 2014:149) bahwa implementasi secara umum tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu tugas implementasi mencakup terbentuknya "*a policy delivery system*", dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Weimber dan Vining dalam (Tahir, 2015:76) mengemukakan ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program :

1. Logika kebijakan.
2. Lingkungan tempat kebijakan dioperasionalkan.
3. Kemampuan implementor kebijakan.

2.2 Evaluasi

Evaluasi kebijakan ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstitusinya sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan (Nugroho, 2017). Tujuan pokok evaluasi bukan untuk menyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara

pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi, evaluasi harus dipahami sebagai suatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan tersebut.

Tujuan evaluasi menurut (Soetari, 2014), yaitu:

1. Mengukur efek suatu program/kebijakan pada kehidupan masyarakat dengan membandingkan kondisi antara sebelum dan sesudah adanya program tersebut.
2. Memperoleh informasi tentang kinerja implementasi kebijakan serta menilai kesesuaian dan perubahan program dengan rencana.
3. Memberikan umpan balik bagi manajemen dalam rangka perbaikan/penyempurnaan implementasi
4. Memberikan rekomendasi pada pembuat keputusan lebih lanjut mengenai program pada masa mendatang.

William N.Dunn dan Ripley dalam (Anggara, 2014), evaluasi berfungsi untuk memenuhi akuntabilitas publik karena sebuah kajian evaluasi harus mampu memenuhi esensi akuntabilitas tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan eksplanasi yang logis atas realitas pelaksanaan sebuah program/kebijakan.
2. Mengukur kepatuhan, artinya mampu melihat kesesuaian antara pelaksana dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Melakukan auditing untuk melihat output kebijakan sampai pada sasaran yang dituju, ada tidaknya kebocoran dan penyimpangan pada penggunaan anggaran, ada tidaknya penyimpangan tujuan dan pelaksanaan program.

4. Akunting, untuk melihat dan mengukur akibat sosial ekonomi dan kebijakan. Misalnya, seberapa jauh program yang dimaksud mampu meningkatkan pencapaian masyarakat dan dampak yang ditimbulkan telah sesuai dengan yang diharapkan.

Dunn menggambarkan kriteria-kriteria kinerja kebijakan yang harus dievaluasi adalah sebagaimana yang tampak didalam tabel berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah apabila suatu kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan. Keinginan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan supaya nilai-nilai yang diinginkan sampai kepada publik. Agar masalah-masalah yang ada dilingkungan masyarakat dapat di atasi dengan baik. Dengan demikian efektivitas dari sebuah kebijakan yang berkenaan dengan apakah hasil yang diinginkan dari sebuah kebijakan telah tercapai.

Berkenaan dengan jumlah usaha yang di perlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang di kehendaki. Dimana di dalam efesiensi dari sebuah kebijakan melihat berapa sumber daya yang digunakan untuk penerapan suatu kebijakan. Untuk mengetahui seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pengimplementasian kebijakan.

2. Kecukupan

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dimana dalam suatu kebijakan terdapat alternatif apa yang dilakukan bila kebijakan telah diimplementasikan. Dengan kata lain seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan telah

memecahkan masalah. Indikator penilaiannya adalah :

2. Perataan

Berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat dari suatu kebijakan. Yang dilihat dari pemerataan adalah apakah manfaat distribusi merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda, dimana ada tiga unsur kelompok dari kebijakan yang harus diperhatikan yaitu :

3. Responsivitas

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Kebijakan ingin melihat bagaimanakah tanggapan dari masyarakat yang menjadi kelompok target kebijakan. Indikatornya adalah respon masyarakat terhadap kebijakan.

4. Ketetapan

Berkenaan dengan pertanyaan *apakah kebijakan tersebut tepat untuk suatu masyarakat?*. Apakah kebijakan yang telah diimplementasikan pemerintah adanya antara tujuan dan hasil yang diperoleh, benar-benar berguna atau bernilai. Untuk ketepatan alternatif yang digunakan dapat diukur dengan indikator : ketepatan dari produk kebijakan.

2.3 Manajemen

Pada awalnya kata “*manage*” ini di adopsi dari bahasa india, *maneggio*, dari bahasa latin, *managiare*, dari kata *manus*, artinya tangan. Kata “*to manage*”, sendiri artinya 1) mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola; 2) memperlakukan. Dari kata *manage* (kata kerja) ini terbentuklah kata-kata lainnya seperti *manager* (kata benda), artinya pengelola/pemimpin usaha; *managerial* (kata sifat), artinya yang berhubungan dengan kepemimpinan/pengelolaan; *managing* (kata sifat), artinya pelaksana, eks:

managing director = direktur pelaksana; *manageable* (kata sifat), artinya dapat diatur/di kendalikan; dan *management*. Ritonga (2015:26).

Haiman dalam (Manullang, 2009:3), mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Hasibuan dalam (Marnis, 2008:3), manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Farland dalam (Brantas, 2009:4) mendefinisikan manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.

Menurut Handoko, ada empat belas prinsip-prinsip manajemen yang dikutip dari Henri Fayol (1841-1925), yaitu:

- Pembagian kerja-adanya spesialisasi akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kerja.
- Wewenang-hak untuk memberi perintah dan di patuhi.
- Disiplin-harus ada respek dan dan ketaatan pada peranan-peranan dan tujuan-tujuan organisasi.
- Kesatuan perintah-setiap karyawan atau anggota organisasi hanya menerima instruksi tentang kegiatan tertentu dari hanya seorang atasan.
- Kesatuan pengarahan-operasi-operasi dalam organisasi yang mempunyai tujuan yang sama harus diarahkan oleh seorang manajer dengan penggunaan suatu rencana.
- Meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan

- umum-kepentingan perseorangan harus tunduk pada kepentingan organisasi.
- g. Balas jasa-kompensasi untuk pekerjaan yang di laksanakan harus adil baik bagi anggota maupun pimpinan.
 - h. Sentralisas-adanya keseimbangan yang tepat antara sentralisas dan desentralisas.
 - i. Rantai saklar (garis wewenang)-garis wewenang dan perintah yang jelas. Dengan jelasnya garis wewenang di harapkan tidak timbul kecemburuan, sehingga konflik juga dapat diminimalisir.
 - j. Order-bahan-bahan (material) dan orang-orang harus ada pada tempat dan waktu yang tepat. Terutama orang-orang hendaknya di tempatkan pada posisi-posisi atau pekerjaan-pekerjaan yang paling cocok untuk mereka.
 - k. Keadilan-harus ada persamaan perlakuan dalam organisasi. Prsamaan yang paling jelas terlihat ketika membebankan tugas, *reward* dan *punishment*.

3.METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan rancangan penelitian yang ditemukan dibanyak bidang, khususnya evaluasi, dimana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, sering kali program, peristiwa, aktivitas, proses, atau satu individu atau lebih. Studi kasus pada penelitian ini yaitu Terminal Tipe C Tuah Tualang di Kabupaten Siak.

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Siak, dengan lokus Terminal Tuah Tualang Perawang dan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Siak.

3.2 Informan Penelitian

- l. Stabilitas staf organisasi-tingkat perputaran tenaga kerja yang tinggi tidak baik bagi pelaksaaan fungsi-fungsi organisasi.
- m. Inisiatif-bawahan harus di beri kebebasan untuk menjalankan dan menyelesaikan rencananya, walaupun beberapa kesalahan mungkin terjadi.
- n. *Esprit de Coros* (semangat korps) “kesatuan adalah kekuatan “pelaksanaan operasi organisasi perlu memiliki kebanggan, kesetiaan dan rasa memiliki dari para anggota yang tercermin pada semangat korps, Ritonga (2015:34).

Follet dalam (Bangun, 2008), mendefinisikan *management is an art*. Stoner yang dirujuk oleh Bangun (2008) mengatakan bahwa manajemen adalah proses membuat perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Dimana peneliti menentukan yang menjadi inforan yaitu orang yang mewakili karakteristik populasi untuk memperoleh data untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Adapun informan pada penelitian ini adalah:

1. Kepala Bidang Perhubungan Darat
2. Kasi Prasarana Lalu Lintas
3. Koordinator Terminal Tuah Tualang
4. PO Bus
5. Supir
6. Masyarakat

3.3 Jenis Data

3.3.1 Data primer

Data yang diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung dengan informan yaitu *state* (Dinas Perhubungan Kabupaten Siak), *private*

sector (pihak swasta) dan *civil society* (masyarakat) yang berkaitan dengan evaluasi tata kelola terminal Tipe C Buah Tualang di Kabupaten Siak. Data juga diperoleh dari observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu di terminal Buah Tualang.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data olahan atau data sumber kedua yang diperoleh dari laporan-laporan penelitian terdahulu, jurnal, buku-buku, internet, media massa, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian sebagai penunjang sebagai kelegkapan dalam penelitian ini, seperti, Profil Kecamatan Tualang. Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Siak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 132 Tahun 2015. Peraturan Bupati Siak Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Siak. Dan Data Trayek Tahun 2018.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, interview, dan dokumentasi.

3.5 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data mentah yang telah diperoleh saat wawancara dan survei. Data mentah yang diperoleh baik dalam bentuk tertulis, *softcopy* dan rekaman ataupun catatan penelitian, dikumpulkan untuk kemudian di transkripsikan menjadi sebuah data dan informan yang lebih sederhana untuk dibaca dan dipahami.

4.HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Evaluasi Tata Kelola Terminal Tipe C Buah Tualang di Kabupaten Siak

4.1.1 Efektivitas

Efektivitas yang ditinjau dari tujuan dari tata kelola terminal Buah Tualang belum tercapai secara maksimal, tentu hal tersebut berpengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai untuk tata kelola terminal Buah Tualang, karena realisasinya sampai saat ini terminal tersebut tidak semua bus menjadikan terminal Buah Tualang sebagai pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan penumpang serta perpindahan moda angkutan dimana hal tersebut tentu berpengaruh terhadap lalu lintas yang menjadi macet akibat tidak teraturnya bus-bus dalam menaikkan dan menurunkan penumpang.

4.1.2 Efesiensi

Evaluasi tata kelola terminal Tipe C Buah Tualang di Kabupaten Siak, yang ditinjau melalui Efesiensi dari segi biaya yang diharapkan, dari segi waktu yang dihabiskan dan dari segi tenaga yang dipakai belum efektif dalam penerapannya. Hal ini dapat dilihat saat ini di terminal Buah Tualang Kabupaten Siak belum terkelola dan masih kurangnya tenaga personil untuk tata kelola terminal ini. Dana yang diperoleh untuk pemeliharaan operasional Terminal Buah Tualang di Kabupaten Siak hanya Rp. 5.000.000/tahunnya diluar gaji pegawai. Hal ini tentu tidak cukup untuk pemeliharaan terminal dan kebutuhan minimal yang ditetapkan terminal Buah Tualang di Kabupaten Siak. Dan kesiapan sumber daya manusia/personil/petugas merupakan aspek yang wajib dipenuhi untuk penyelenggaraan terminal.

4.1.3 Kecukupan

Kinerja pelaksanaan tata kelola terminal Buah Tualang masih kurang baik, begitu pula pengawasan yang dilakukan kurang baik, karena yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang untuk pengawasan sendiri adalah Dinas Perhubungan. Kinerja pelaksana tata kelola terminal seharusnya memiliki kualitas dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan lebih bertanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan. Serta memahami tugas-tugas yang harus dilakukan oleh setiap personil terminal. Hal tersebut untuk mendukung tercapainya tata kelola terminal yang lebih efektif.

4.1.4. Pemerataan

Pemerataan ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus menyesuaikan Tipe terminal sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat karena setiap tahunnya kebutuhan masyarakat sendiri akan berubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Akan tetapi hingga saat ini pemerintah belum menaikkan tipe terminal, sehingga mengakibatkan banyaknya pelanggaran yang terjadi.

4.1.4 Responsivitas

kepuasan masyarakat mengenai tata kelola Terminal Buah Tualang ini masih kurang puas dan perlu melakukan tata kelola yang lebih baik lagi kedepannya dan meningkatkan upaya dalam pelaksanaan tata kelola Terminal Buah Tualang. Pihak yang berwenang harus memberikan bukti kepada masyarakat bukan hanya sekedar janji saja. Karena suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam

bentuk positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

4.1.5 Ketetapan

Ketetapan dalam tata kelola Terminal Buah Tualang di Kabupaten Siak perlu diperbaiki lagi kedepannya dan menjalankan fungsi terminal yang lebih baik lagi. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat merasa terminal tersebut perlu dilakukan peningkatan Tipe terminal. Dalam hal ini pemerintah harus mampu membuat alternatif untuk tata kelola terminal Buah Tualang ini, karena berdasarkan observasi peneliti masih belum terlaksana secara optimal kondisi ini akan terus seperti ini apabila pemerintah tidak menindaklanjuti dan menegakkan hukum secara intensif. Pemerintah sebaiknya harus mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah tata kelola terminal yang terjadi di Terminal Buah Tualang di Kabupaten Siak. Salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah Daerah dan segenap akademisi adalah perlu adanya pengkajian mendalam mengenai tata kelola Terminal Buah Tualang di Kabupaten Siak.

4.2 Faktor-faktor yang menghambat Evaluasi Tata Kelola Terminal Tipe C Buah Tualang di Kabupaten Siak.

4.2.1 Akseibilitas/Jaringan Trayek Angkutan Umum

Tidak tersedianya trayek angkutan lokal yang mendukung dan melayani akseibilitas penumpang dari dan ke terminal Buah Tualang secara langsung menyebabkan pengguna jasa angkutan umum tidak memanfaatkan terminal sebagai tempat perpindahan moda angkutan. Dan secara langsung menyebabkan kendaraan angkutan umum tidak masuk terminal.

Untuk menciptakan keterpaduan dan integrasi trayek tersebut maka perlu dilakukan penyediaan/penataan trayek

angkutan umum, terutama angkutan lokal serta menjadikan terminal Tuah Tualang ini sebagai simpul dari jaringan dan sistem angkutan umum tersebut.

4.2.2 Penyimpangan Trayek AKAP

Kabupaten Siak khususnya Kecamatan Tualang walaupun tidak termasuk dalam jaringan trayek angkutan AKAP, namun telah disinggahi dan menjadi asal tujuan angkutan AKAP dari pulau sumatera maupun dari jawa. Kondisi ini telah terjadi sejak tahun 1990 - an, sebelum Kabupaten Siak terbentuk.

4.2.3 Sarana dan Prasarana

Fasilitas di terminal perlu dilakukan penyediaan, penataan, perawatan dan pemeliharaan terminal secara rutin sehingga pemanfaatan fasilitas terminal dapat berfungsi secara optimal dan untuk menjamin terpenuhinya aspek fasilitas yang baik. Kondisi fasilitas utama terminal Tuah Tualang saat ini yaitu: fasilitas penerangan di gedung terminal banyak yang tidak menyala. Fasilitas penerangana di luar terminal banyak yang tidak menyala. Fasilitas air bersih tidak berfungsi secara maksimal. Dan kebersihan diluar/pekarangan terminal yang tidak terjaga kebersihannya.

4.2.4 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Hal ini disebabkan karena masyarakat merupakan komponen yang penting dalam sebuah kebijakan untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan. Yang dimaksud partisipasi masyarakat disini adalah keikutsertaan atau kepedulian masyarakat dalam melaksankan tata kelola terminal Tuah Tualang.

4.2.5 Anggaran

Tata kelola terminal yang baik tentu membutuhkan adanya biaya yang memadai. bahwa dengan jumlah dana yang sangat minim tidak sesuai dengan

kebutuhan minimum yang dibutuhkan oleh Terminal Tuah Tualang. Hal tersebut untuk sebuah tata kelola terminal yang baik sangat menghambat pelaksanaannya, untuk pemeliharaan terminal sendiri yang harus dilakukan yaitu menjaga kebersihan bangunan beserta perbaikannya, menjaga kebersihan peralatan terminal, perawatan tanda-tanda dan perkerasan peralatan.

4.2.6 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang tidak memadai menghambat terhadap tata kelola terminal. Jika jumlah sumber daya nya saja tidak terpenuhi bagaimana tata kelola terminal dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Sumber daya yang dibutuhkan juga haruslah berkompeten dan bertanggung jawab yang dapat memaksimalkan hasil kebijakan mengenai tata kelola terminal agar manfaat dari tata kelola sendiri dapat dirasakan oleh kelompok yang ada.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan informan serta analisa peneliti dan semua indikator yang telah di sajikan pada bab sebelumnya, mengenai Evaluasi Tata Kelola Terminal Tipe C Tuah Tualang di Kabupaten Siak maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas, belum berjalan dengan maksimal dikarenakan tujuan yang diharapkan realisasinya sampai saat ini terminal tersebut tidak semua bus menjadikan terminal Tuah Tualang sebagai pangkalan kendaraan bermotor umum. Efisiensi belum efektif dalam penerapannya, Hal ini dapat dilihat saat ini belum terkelola dan masih kurangnya tenaga personil untuk tata kelola terminal ini. Kecukupan dimana kinerja pelaksanaan tata kelola terminal

Tuah Tualang masih kurang baik, begitu pula pengawasan yang dilakukan kurang baik, karena yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang untuk pengawasan sendiri adalah

Dinas Perhubungan. Pemerataan, tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus menyesuaikan Tipe terminal sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat karena setiap tahunnya kebutuhan masyarakat sendiri akan berubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Selanjutnya

Responsivitas, mengenai kepuasan masyarakat tentang tata kelola Terminal Buah Tualang ini masih kurang puas. Serta ketetapan perlu ditingkatkan lagi. Pemerintah sebaiknya harus mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah tata kelola terminal yang terjadi di Terminal Buah Tualang di Kabupaten Siak.

2. Faktor-faktor yang menghambat Evaluasi Tata kelola terminal Tipe C Buah Tualang Di Kabupaten Siak adalah, Akseibilitas/Jaringan Trayek Angkutan Umum. Penyimpangan Trayek AKAP. Sarana dan prasarana. Partisipasi masyarakat. Anggaran. Serta Sumber daya manusia

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai Evaluasi Tata Kelola Terminal Tipe C Buah Tualang di Kabupaten Siak. Maka peneliti mencoba untuk memberikan saran mengenai hasil penelitian. Bahwa untuk penyelenggaraan operasional Terminal Buah Tualang di Kabupaten Siak perlu dilakukan :

1. Lokasi terminal hendaknya dapat menjamin penggunaan dan operasi

kegiatan fungsi terminal yang efisien dan efektif.

2. Terminal Tipe C Buah Tualang seharusnya dilakukan Penyediaan dan penataan sistem dan jaringan trayek angkutan umum masuk keluar terminal, sehingga trayek dapat memasuki terminal dengan teratur. Seharusnya dilakukan Peningkatan pelayanan terminal: Pemenuhan sumber daya manusia/personil terminal, Penyediaan, penataan, pemeliharaan dan perawatan fasilitas terminal. Mempertegas pengawasan/penegakan hukum terhadap angkutan umum yang tidak masuk terminal, pengawasan atau penegakan hukum terhadap operasi angkutan tidak resmi. Serta penyelenggaraan terminal tersebut perlu adanya biaya operasional yang bersumber dari APBD atau sumber lain berdasarkan ketentuan yang berlaku. Melaksanakan program pengembangan terminal Buah Tualang sehingga apa yang direncanakan dari studi yang telah dilaksanakan dapat tercapai seperti : pengembangan terminal dengan mengakomodir Angkutan jenis AKAP, pengadaan Pasar Tradisional di dekat Terminal dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*, Bandung : Alfabeta.
- Anggara, Sahaya. (2014). *Kebijakan Publik. Bandung* : CV Pustaka Setia
- Arikunto, S. (2010). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Athoillah, Anton. (2010). *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung Pustaka setia.

- Creswell, J.W. (2016). *Research Design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta : PT Pustaka Pelajar.
- Dewi, Ira Chrisyanti. (2011). *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Dunn, William N. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Kusumanegara, Solahuddin. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Manullang, M. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Marnis. (2008). *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru : Unri Press.
- Nugroho, Riant D. (2014). *Public Policy*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- (2017). *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Nurchollis. (2014). *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Purwanto, Irwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Ritonga, Hasnum Januahari, (2015). *Manajemen Organisasi Pengantar Teori dan Praktek*, Medan : Perdana Publishing.
- Sadermayanti. (2010). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Bandung : Rafika Aditama
- Safi'i. (2009). *Manajemen Pembangunan Daerah*. Malang : Averroes Press.
- Sinambela, Lijian Poltak, dkk. (2006). *Reformasi Pelayan Publik Teori: Kebijakan dan implemantasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Siswanto. (2005). *Pengantar Manajemen*. Bandung : Bumi Aksara.
- Sujianto. (2005). *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Praktis (Studi Implementasi Pembangunan Perkebunan Daerah Transmigrasi Riau)*. Alaf Riau : Graha Unri Press
- Suharno. (2013), *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Tahir, Arifin. (2015). *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta : (YPAPI) Lukman Offset
- Thoha, Miftah. (2008), *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Winarno, Budi. (2014). *Teori, Proses dan Studi Kasus Kebijakan Publik*. Media Caps: Yogyakarta.
- Jurnal :**
- A. Rahmi. (2013). *Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A (Studi kasus : Terminal Reginal Daya Kota Makassar)*.
- Ayu Amrina Rosyada. (2016). *Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kota Samarinda*. eJournal Ilmu Pemerintahan. Volume 4 Nomor 1. ISSN 2477-2631. Fisip-Unmul.
- Christian B.A Gultom. (2014). *Pengelolaan Terminal Bandar Raya Payung Sekaki oleh Unit*

- Pelaksana Teknis Dinas (uptd) Terminal Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru. Jom FISIP Vol. 1 No. 2-Okttober 2014*
- Iqbal Ruliansyah. (2018). *Evaluasi Kebijakan Pemabngunan Terminal Hamid Rusdi di Kota Malang. JIAP Vol. 4 No. 1 – april 2018*
- Muh. Aslan, Muhlis Madani, Nuraeni Aksa. (2015). *Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Terminal di Terminal Regional Daya Kota Makassar. Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 3 – Desember 2015*
- Muhammad Rangga Sudrajat. (2017). *Pengawasan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatka (Dishubkominfo) Kota Pekanbaru Terhadap Fungsi Terminal Angkutan Umum Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru Tahun 2016. Jom FISIP Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017*
- Nelma Neti. (2016). *Evaluasi Penataan Kawasan Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi. Jom FISIP Vol.3 No. 2 – Oktober 2016*
- Sigit Nurshhabri. (2018). *Analisis Kebijakan Pengelolaan Terminal Tipe A Cicaheum Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 di Kota Bandung. 6-Agustus 2018*
- Sujianto. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik. Pekanbaru : Alaf Riau*
- Tahir, Arifin.2015.*Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta.*
- Yaniar Fidianingrum, Hermawan, Sukanto. *Evaluasi Dampak Kebijakan Pengembangan Terminal Kertosono (Studi Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk). Jurnal Administrasi Publik (JIAP) Vol. 1 No. 2*
- Yasmi Octaviana. (2017). *Studi Tentang Pengelolaan Terminal Bus Antar Kota dalam Provinsi di Kota Balikpapan. eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 5 No. 1 2017.*
- Dokumen :**
- Data trayek terminal Tuah Tualang Tipe C Kabupaten Siak 2018.
- Peraturan Bupati Siak Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Siak.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 132 Tahun 2015 Tetntang Penyelenggaraan Terminal Peumpang Angkutan Jalan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Website :**
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Siak. Diakses pada tanggal 14 September 2018, pukul 15.16 wib.
- <http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/07/18/terminal-tidak-berfungsi-organda-minta-pemkab-siak-serius-mengelola>. Diakses pada tanggal 18 juli 2018, pukul 15.21 wib.